

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Hasil pengujian hipotesis variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Karena di peroleh nilai t-hitung 2.071 yang berarti lebih besar dari t-tabel 1.67303 dengan probabilitas (p) 0.43 yaitu lebih kecil dari 0.05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pirade dkk (2013) yang menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Maka dengan demikian untuk hipotesis pertama diterima yaitu  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima.
2. Hasil pengujian hipotesis variabel Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,397 yang berarti lebih besar dari t-tabel 1.67303, dengan nilai probabilitas (p) 0.020 yaitu lebih kecil dari 0.05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Auditya dkk (2013) yang menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka dengan demikian hipotesis kedua diterima yaitu  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima.

3. Hasil pengujian dengan menggunakan uji-F memperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 14.363 yang berarti lebih besar dari  $F_{tabel}$  sebesar 3,16 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05. Dengan hasil pengujian tersebut dapat dikatakan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah (X1), Transparansi (X2) berpengaruh simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y). Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pada Pemerintah Kota Gorontalo khususnya DPPKAD Kota Gorontalo perlu memperhatikan sumberdaya manusia yang berlatar belakang akuntansi untuk menunjang penerapan akuntansi pemerintah dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual yang dimulai sejak tahun 2015 yang menjadi masalah dalam penerapan SIKD dan perlu diadakan pelatihan agar lebih kompeten di bidang masing masing serta dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
2. Perlu diperhatikan kembali transparansi mengenai sumber informasi penggunaan laporan kinerja pemerintah daerah yang masih sulit untuk dapat diakses.
3. Pengaruh variabel SIKD dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah hanya sebesar 0.331 atau 33,1% dan sisannya sebesar 66,9% yang dipengaruhi variabel lain. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat

menambahkan variabel-variabel terkait kinerja pemerintah daerah seperti variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengaruh Pengawasan Keuangan.

## Daftar Pustaka

- Adiwirya, Muhammad Firdiansyah DKK. 2015. Akuntabilitas, Transparansi dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *e-journal*. Universitas Udayana, Bali, Indonesia.
- Andriany, Ayu. 2009. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Aset Daerah pada Pemerintahan Kota Medan. *Skripsi*. Universitas Sumatra Utara.
- Anggaraeni, Meyta DKK. 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, dan Komitmen Manajemen Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *e-journal*. Universitas Ganesha Singaraja, Indonesia.
- Annisaningrum. (2010). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan.(online). (diakses 14 Mei 2013) tersedia di World Wide Web: <http://ovy19.wordpress.com>.
- Anwar dan Otaya, 2015. *Statistika Pendidikan Teori dan Aplikasi*. Sultan Amai Press: Gorontalo.
- Asrida. 2012. Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen. *e-journal*. Universitas Almuslim Bireun, Aceh.
- Auditya, Lucy DKK. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *e-journal*. Universitas Bengkulu.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Yogyakarta.
- BPK RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014.
- Coryata, Isma. (2007). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas. Makasar.
- Darise, Nurlan, "*Pengelolaan Keuangan Daerah*" Edisi kedua, Penerbit PT. Indeks, 2009.

- Diani, Dian Irma, 2014. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, Iman. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Hall, James A. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, Iqbal. 2006. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Manaroinsong, Johny. 2014. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan, Partisipasi Anggaran, Serta Sikap Perilaku Aparat Terhadap Kinerja Keuangan daerah di Provinsi Sulaesi Utara. *e-journal*. Universitas Negeri Manado.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: PT. Andi.
- Narimawati, Umi. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Agung Media.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pasaribu. FJ. (2011). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD. *Tesis*. Medan. Program Pasca Sarjana Univ.Sumatera Utara.

- Pirade, Dominggus DKK. 2013. Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pegawai Di Kabupaten Tana Toraja. *e-journal*. Unhas. Makassar.
- Rachmawati, S. 2008. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit Delays dan Timeliness, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol.10: Hal. 1-10.
- Rahayu, Ni Luh Sri DKK. 2014. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *e-journal*. Universitas Ganesha Singaraja, Indonesia.
- Rahmanurrasjid, Amin. (2008). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah. Tesis Tidak Dipublikasikan. Semarang. Program Magister Ilmu Hukum-Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- , Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
- , Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
- , Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- Santoso. 2009. *Metode Penelitian dan Tesis Bisnis*. Penerbit PT Indeks.
- Sugiono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sultiyani, Ambar. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Graham Ilmu: Yogyakarta.
- Tahir, Arifin. 2011. Kebijakan Publik Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: PT. Grafika Utama.

Tumarni. 2015. Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, dan Penggunaan Nyata Terhadap Kepuasan Pemakai Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Provinsi Jambi. *e-journal*. Universitas Jambi.

Werimon, Simson, Imam Ghozali, & M. Nasir, 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X Makasar. Hal 21-23.

Wiranto, Tatang. (2012). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik. (online). (diakses tanggal 5 November 2012. Tersedia di World Wide Web: <http://www.depkominfo.go.id>

Sumber Lain :

<Http://akuntansidppkadgtlo.blogspot.co.id/>

<http://anggyansyah.blogspot.co.id/>

<http://fia-ub.blogspot.co.id/2015/11/teori-keagenan-agency-theory.html>

<http://www.bpk.go.id>.

<https://www.coursehero.com/file/11654722/Teori-keagenan/>